



Accepted: October 2023	Revised: December 2023	Published: February 2024
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan

Fadhilah Rahmafitri

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

e-mail: fadhilahrahmafitri1@gmail.com

Elvi Deswita

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Batusangkar, Indonesia

e-mail: elvideswita29@gmail.com

Ridwal Trisoni

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

e-mail: ridwal.trisoni@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract

This article discusses the Analysis of the Merdeka Curriculum Policy and Its Implications on the Quality of Indonesian Education. This policy is a response to global developments and the demands of the times, necessitating a more inclusive, adaptive, and relevant education. The research method employed is library research, which involves examining relevant sources or references to address research problems and find solutions. The research findings indicate that the Merdeka Belajar Policy has significantly and critically impacted the quality of education in Indonesia. It not only makes education more relevant but also aligns Indonesian education with the demands of the times, balancing global and local perspectives to ensure a better quality of education for future generations. The importance of the Merdeka Curriculum in the 4.0 era is emphasized, with a primary focus on enhancing literacy, numeracy, and character development. Concrete findings from this research show that emphasis on these three aspects forms the fundamental basis for improving the quality of education.

Keywords: *Policy analysis; independent curriculum; policy implications.*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Implikasinya terhadap Kualitas Pendidikan Indonesia. Kebijakan ini merupakan respon terhadap perkembangan global dan tuntutan zaman yang memerlukan pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode library research, yaitu metode penelitian yang menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menelaah sumber atau referensi yang relevan dengan permasalahan penelitian untuk mencari jawaban permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar telah membawa dampak positif yang sangat penting pada kualitas pendidikan di Indonesia. Ini bukan hanya sekadar membuat pendidikan lebih relevan, tetapi juga mengarahkan pendidikan Indonesia agar lebih sejalan dengan tuntutan zaman, menyeimbangkan perspektif global dan lokal untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Pentingnya Kurikulum Merdeka dalam era 4.0 ditekankan, dengan fokus utama pada peningkatan literasi, numerasi, dan pembangunan karakter. Temuan dari penelitian ini secara konkret menunjukkan bahwa penekanan pada tiga aspek ini merupakan landasan utama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan; Kurikulum Merdeka; Implikasi Kebijakan.

Pendahuluan

Pada prinsipnya, sistem diciptakan dengan harapan bahwa jika dijalankan sesuai prosedur, maka tujuan tertentu akan tercapai. Namun, untuk menjalankan sistem dengan baik, dibutuhkan individu yang mampu melaksanakan proses tersebut dengan tepat. Oleh karena itu, setiap kali sebuah sistem diterapkan, penting untuk menganalisis individu-individu yang akan menjadi pelaksana utama dari sistem tersebut. Hal ini terutama berkaitan dengan kesiapan mereka dalam melaksanakan sistem dengan benar. Dalam konteks sistem pendidikan, guru merupakan pilar utama yang diharapkan mampu mengimplementasikan seluruh kebijakan pendidikan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran W. Sharuji & N. Nordin (2017), yang menyatakan bahwa guru memiliki peran kunci dalam menerapkan program pengajaran dan pembelajaran di lingkungan sekolah.

Saat ini, di bawah kepemimpinan Bapak Nadiem Makarim, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperkenalkan sebuah program pendidikan yang dikenal dengan sebutan "Merdeka Belajar". Program ini mengintegrasikan sejumlah kegiatan yang seharusnya diadopsi oleh keseluruhan komunitas pendidikan di lingkungan sekolah, terutama oleh para guru. Program tersebut mencakup sejumlah inisiatif, termasuk KIP Sekolah, Digitalisasi Sekolah, Peningkatan Prestasi dan Karakter, Guru Penggerak, Kurikulum Baru, Pembaruan Pendidikan Vokasional, Institusi Pendidikan Merdeka, serta Pemajuan Kebudayaan dan Bahasa.

Sejak 2019, Kemendikbud telah menginisiasi perubahan mendasar dalam sistem pendidikan melalui program Merdeka Belajar yang diterapkan di semua tingkat pendidikan, dari dasar hingga tinggi. Konsep Merdeka Belajar menggambarkan ide kebebasan dalam proses pembelajaran, memberikan siswa kesempatan untuk belajar tanpa tekanan atau kecemasan, sesuai dengan minat pribadi mereka. Dengan ide ini, setiap siswa dapat belajar sesuai dengan bakat dan minatnya sendiri, membangun portofolio yang mencerminkan minat dan keahliannya tanpa dipaksa belajar di luar bidang minatnya. Memaksa siswa belajar di luar kemampuan mereka dianggap tidak masuk akal, tindakan yang tidak dilakukan oleh guru yang bijak. Merdeka Belajar juga menekankan pentingnya kemerdekaan berpikir, yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh guru. Tanpa kemampuan ini pada guru, hal serupa tidak dapat dialami oleh murid.

Kurikulum merupakan komponen penting dalam ranah pendidikan, yang dapat dijelaskan sebagai suatu rencana program yang dibuat untuk kepentingan peserta didik, sebagaimana diuraikan oleh Oemar Hamalik (2012) dalam kajiannya tentang manajemen pengembangan kurikulum, kurikulum diartikan sebagai sebuah rencana program pendidikan yang dirancang khusus bagi peserta didik sebagai bagian integral dari proses belajar. Sasaran utama dari kurikulum ini adalah untuk menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan siswa dengan mengaitkannya pada tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum mencakup keseluruhan proses yang terkait dengan kebijakan pendidikan nasional yang dibentuk berdasarkan arah visi, misi, dan strategi nasional dalam pendidikan. Proses ini meliputi fase perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi.

Kurikulum Merdeka merupakan ide kurikulum yang menekankan variasi pembelajaran dalam batasan kurikuler, memungkinkan penyesuaian optimal pada konten dengan maksud memberikan siswa kesempatan lebih luas untuk memahami konsep dan memperkuat kemampuan (Khoirurrijal, Fadriati, Sofia, Anisa Dwi Makrufi, Sunaryo Gandi, Abdul Muin, Tajeri, Ali Fakhrudin, Hamdani, 2022). Menurut Kemendikbudristek, guru memiliki kewenangan untuk memilih berbagai perangkat ajar yang sesuai, sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa.

Lahirnya Kebijakan Pemerintah mengenai Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar merupakan momen krusial dalam perkembangan sistem pendidikan Indonesia. Kebijakan ini muncul dari pemahaman yang mendalam akan pentingnya transformasi dalam pendidikan, sejalan dengan tuntutan zaman, kebutuhan masyarakat, dan perubahan teknologi. Diperkenalkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2020, kebijakan ini telah menjadi fokus utama dalam reformasi pendidikan di negara tersebut.

Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar telah mengubah dasar sistem pendidikan Indonesia. Langkah ini merupakan respons terhadap tuntutan zaman yang semakin global dan menuntut pendekatan pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan. Sejak beberapa tahun terakhir, kebijakan ini telah menjadi sorotan utama dalam dunia pendidikan, mengubah sejumlah aspek dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Menyelami latar belakang dari munculnya Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar, kita perlu memahami perubahan dalam lingkungan sosial, teknologi, dan ekonomi yang telah membawa tantangan besar bagi sistem pendidikan tradisional. Kurikulum yang terlalu kaku dan terstandarisasi mungkin tak lagi mampu memenuhi kebutuhan pendidikan yang semakin kompleks di era ini. Maka, pemahaman mendalam akan landasan serta motivasi di balik kebijakan ini menjadi krusial untuk memahami peran dan implikasinya.

Selain itu, dalam menganalisis Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar, penting juga mempertimbangkan dampaknya pada kualitas pendidikan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan muncul tentang sejauh mana kebijakan ini berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran, hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam implementasi, dan apakah ada peluang perbaikan yang bisa diidentifikasi.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan di sekolah-sekolah. Dengan demikian, kita dapat menelaah lebih rinci tentang pengaruh kebijakan ini pada sistem pendidikan Indonesia secara keseluruhan dan sejauh mana berhasil mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik terkait perubahan dalam

pendidikan Indonesia dan menjadi landasan untuk evaluasi kebijakan pendidikan yang lebih komprehensif di masa mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang melibatkan proses pengumpulan informasi dari sumber-sumber pustaka. Kegiatan ini mencakup membaca, mencatat, dan mengelola materi dari berbagai koleksi perpustakaan tanpa memerlukan investigasi langsung di lapangan (Mestika, 2004). Metode penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari teori, konsep, dan kajian literatur yang relevan guna menjawab pertanyaan yang muncul dalam penelitian.

Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan pemerintah terkait Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar serta dampaknya pada mutu pendidikan di lingkungan sekolah. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer meliputi Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar, sedangkan sumber data sekunder mencakup buku-buku yang menganalisis sistem dan kebijakan serta hasil penelitian terkait dengan analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada analisis komparatif serta menganalisis dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Azmar, 2001). Data dianalisis dengan teknik reduksi, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Informasi yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan pertanyaan penelitian, kemudian diteliti, diinterpretasikan, dan disimpulkan dengan menggunakan teori serta sumber data yang sesuai.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Kebijakan

Hasil dari *Program for International Student Assessment (PISA)* (Kemdikbud, 2022) menyatakan bahwa sekitar 70% siswa usia 15 tahun berada di bawah standar minimum dalam pemahaman membaca yang sederhana atau penerapan prinsip-prinsip dasar matematika. Hasil PISA ini menunjukkan kurangnya kemajuan yang signifikan dalam satu dekade hingga lima belas tahun terakhir. Penelitian ini juga mencatat adanya ketidakmerataan yang jelas dalam tingkat pendidikan di berbagai daerah dan golongan sosial-ekonomi. Dinamika ini semakin dipersulit oleh dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19.

Ketidakmampuan mayoritas siswa dalam mencapai standar kompetensi pada keterampilan dasar seperti membaca dan matematika merupakan perhatian utama dalam ranah pendidikan. Stagnansi hasil PISA selama satu dekade terakhir menyoroti perlunya inovasi dalam pendekatan pengajaran serta pemahaman yang lebih baik mengenai cara menginspirasi motivasi belajar siswa. Selain itu, disparitas dalam kualitas pendidikan antar wilayah dan kelompok sosial-ekonomi menjadi isu krusial yang harus segera diatasi guna memastikan kesempatan pendidikan yang lebih merata.

Pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi pendidikan, dengan banyak siswa mengalami ketidaksetaraan akses ke pembelajaran online dan gangguan dalam rutinitas belajar mereka (Kemdikbud, 2022). Maka, upaya untuk memulihkan dan mengubah sistem pendidikan menjadi semakin krusial dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan ini. Tantangan utama adalah

bagaimana merancang strategi pendidikan yang lebih inklusif, kreatif, dan sesuai dengan tuntutan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian (Mendikbud, 2020).

Menghadapi situasi sosial yang tidak diharapkan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 (Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19), tujuannya adalah menerapkan kebijakan pendidikan darurat guna mengurangi penyebaran infeksi virus corona. Dalam dokumen ini, diuraikan enam langkah strategis yang perlu dilakukan dalam menjalankan kebijakan pendidikan darurat, termasuk aspek ujian nasional, pembelajaran dari rumah, pelaksanaan ujian di sekolah, kebijakan peningkatan kelas, penerimaan siswa baru, dan alokasi dana Bantuan Operasional.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Kemendikbudristek telah mengimplementasikan penyederhanaan kurikulum pada situasi khusus melalui Kepmendikbud Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus (2020), dikenal sebagai "kurikulum darurat," dengan tujuan untuk mengatasi dampak ketertinggalan pembelajaran selama pandemi. Hasil dari implementasi ini menunjukkan bahwa dari sekolah yang menggunakan kurikulum darurat, sekitar 31,5% di antaranya menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam mengurangi dampak pandemi pada literasi sebesar 73% dan numerasi sebesar 86% (Jojo & Sihotang, 2022).

Penerapan kurikulum dalam keadaan istimewa bertujuan memberikan tingkat fleksibilitas yang lebih besar bagi institusi pendidikan dalam menentukan kurikulum yang paling cocok dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Dalam kondisi pendidikan yang spesifik ini, institusi pendidikan memiliki tiga opsi: (1) tetap mematuhi Kurikulum Nasional; (2) menggunakan kurikulum darurat yang tersedia; atau (3) menyederhanakan kurikulum mereka sendiri sesuai dengan situasi yang mereka hadapi (Kemendikbud, 2020). Keputusan ini dapat diambil oleh semua tingkatan pendidikan dalam situasi khusus, memberikan beragam pilihan dalam menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan situasi yang dihadapi.

Kurikulum darurat dalam situasi khusus sebenarnya adalah penyederhanaan dari kurikulum nasional. Kurikulum darurat ini mengurangi jumlah kompetensi dasar di setiap mata pelajaran, dengan maksud agar guru dan siswa dapat lebih fokus pada keterampilan yang paling penting serta kemampuan dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pembelajaran ke tingkat berikutnya. Penerapan kurikulum darurat juga terbukti secara signifikan mengurangi indikasi penurunan hasil belajar selama pandemi, baik dalam aspek literasi maupun numerasi (Kemendikbud, 2020).

Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar

Kurikulum merupakan bagian penting yang wajib ada dan diimplementasikan di suatu unit atau lembaga pendidikan. Ini merupakan serangkaian instruksi yang berisi beragam rencana kegiatan pembelajaran yang menjadi bagian integral dari proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman melalui kegiatan di lingkungan sekolah (Mudlofir, 2012).

Kurikulum pendidikan adalah sistem yang dinamis, perlu adaptasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman serta karakteristik siswa. Di Indonesia, sejarah kurikulum pendidikan telah mengalami serangkaian revisi sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 1947 dengan nama Kurikulum Rentjana Pembelajaran 1947. Evolusinya terus berkembang hingga mencapai Kurikulum Merdeka. Dalam sejarah pendidikan Indonesia, tercatat sepuluh kali perubahan kurikulum, termasuk tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan 2022. Pengembangan

kurikulum pendidikan di Indonesia merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Cholilah et al., 2023).

Ide inti dalam penyusunan Kurikulum Merdeka adalah konsep filosofis Merdeka Belajar. Hal ini menjadi dasar bagi berbagai kebijakan pendidikan lainnya dan tercermin dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 2020-2024 (Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa Merdeka Belajar bertujuan mengubah paradigma dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Fokus utamanya adalah memperkuat peran guru sebagai fasilitator, mengurangi kendali standar yang kaku di lembaga pendidikan di Indonesia, dan memberi penekanan pada "*student agency*," yang menekankan hak siswa untuk mengambil inisiatif dalam cara mereka belajar dengan menetapkan tujuan, merenung, dan bertindak proaktif dalam pencapaian belajar pribadi.

Menurut kesimpulan Agustinus Tanggu Daga dari berbagai sumber, Merdeka Belajar dalam konteks pembelajaran dapat diartikan sebagai kebebasan untuk berpikir, berinovasi, belajar secara mandiri dan kreatif, serta kebebasan untuk mencapai kebahagiaan (Daga, 2021). Merdeka belajar mendorong kebebasan pikiran peserta didik, mendorong eksplorasi prinsip pendidikan Ki Hadjar Dewantara (*Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani*) dalam struktur pendidikan Indonesia, menekankan keterbukaan pikiran (Suhartono, 2021).

Penerapan Kurikulum Merdeka mendorong pendekatan pembelajaran yang relevan dan interaktif, memungkinkan eksplorasi isu-isu kontemporer seperti lingkungan dan kesehatan. Tujuannya adalah memperkuat karakter dan kompetensi sesuai Profil Pelajar Pancasila. Lembaga pendidikan pada Tahun Ajaran 2022/2023 memiliki tiga opsi untuk menerapkan Kurikulum Merdeka: mengadopsi sebagian prinsip, menggunakan materi yang sudah ada, atau merancang materi pembelajaran sesuai kebutuhan mereka sendiri.

Program Merdeka Belajar adalah upaya meningkatkan standar pendidikan sejak kemerdekaan Indonesia, fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan revitalisasi sistem pendidikan nasional. Inisiatif ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang memicu kegembiraan bagi siswa dan pendidik. Menurut E. Dharma & B. Sihombing (2020), Program Merdeka Belajar terdiri dari empat prinsip utama, yaitu USBN, UN, RPP, dan PPDB berbasis zona. Prinsip-prinsip ini memiliki penjelasan tersendiri:

Pertama, USBN 2020 memberikan keleluasaan pada lembaga pendidikan untuk mengevaluasi pencapaian belajar siswa secara lebih variatif. Guru dapat menggunakan portofolio, tugas, ujian tulis, atau bentuk penilaian lain yang relevan dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Penentuan kelulusan siswa ditangani oleh lembaga pendidikan atau program pendidikan yang bersangkutan.

Kedua, UN adalah proses evaluasi prestasi kompetensi lulusan secara nasional dalam mata pelajaran tertentu. Tahun 2021, UN digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang lebih mengedepankan literasi, numerasi, dan aspek pendidikan karakter. Asesmen ini akan diterapkan di titik-titik penting jenjang pendidikan, seperti kelas 4, 8, dan 11, untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan memastikan bahwa siswa memiliki kompetensi dasar.

Ketiga, regulasi ini menyederhanakan penyusunan RPP dengan fokus pada tujuan, langkah pembelajaran, dan evaluasi. Sekolah dan guru memiliki kebebasan dalam menciptakan, menggunakan, serta memperkaya format RPP secara mandiri. RPP yang dihasilkan hendaknya lebih

sederhana dan efisien, tidak terlalu rumit, serta memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran.

Keempat, kuota penerimaan siswa baru melalui jalur prestasi ditingkatkan dari 15% menjadi 30%. Selain itu, jalur afirmasi ditambahkan bagi peserta didik yang memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dengan ini, PPDB masih berbasis zonasi, namun dengan fleksibilitas dalam pelaksanaannya untuk menyesuaikan ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Merdeka Belajar merupakan konsep yang menekankan kebebasan dan perubahan dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip Merdeka Belajar memberikan ruang lebih bagi guru dan sekolah untuk mengevaluasi serta mengembangkan hasil belajar siswa secara lebih fleksibel. Dengan pendekatan ini, mutu pendidikan dapat diperbaiki, dan suasana belajar dapat menjadi lebih dinamis dan interaktif.

Salah satu aspek yang menjadikan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) unik adalah keberadaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang merupakan bagian integral dari kurikulum tersebut. P5 merupakan wujud nyata dari kurikulum merdeka dan mengharuskan partisipasi siswa dalam kegiatan ini. Terdapat tujuh tema dalam P5 yang meliputi berbagai aspek penting seperti Gaya Hidup Berkelanjutan, Kearifan Lokal, Bhinneka Tunggal Ika, Pengembangan Jiwa dan Fisik, Partisipasi Demokratis, Penerapan Teknologi untuk Kemajuan NKRI, dan Kewirausahaan. Sebelum siswa terlibat dalam kegiatan P5, sekolah disarankan untuk membentuk tim proyek yang terdiri dari guru-guru yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek di setiap tema yang dipilih oleh sekolah (Kemendikbudristek, 2022).

Pengenalan gagasan Merdeka Belajar telah membuka ruang untuk pertumbuhan pendidikan yang lebih dinamis dan kreatif. Melalui penerapan IKM dan pelaksanaan P5, siswa didorong untuk memperluas pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip Pancasila dan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan inovatif. Seiring dengan itu, guru dan lembaga pendidikan juga mendapatkan kebebasan yang lebih besar dalam mengevaluasi dan menggali potensi siswa (Kemendikbudristek, 2022). Dengan ini, Merdeka Belajar tidak hanya mengubah cara siswa belajar, tetapi juga mengubah pendekatan pendidikan secara keseluruhan menuju suatu pendidikan yang lebih relevan dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Pemerintah Indonesia telah menyediakan berbagai sarana untuk mempermudah pemahaman tentang Kurikulum Merdeka melalui Program Merdeka Belajar (PMM), komunitas belajar, Narasumber Berbagi Praktik Baik (NS BPB), serangkaian webinar, kolaborasi dengan mitra pembangunan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, dan layanan bantuan pusat (helpdesk) yang tersedia di situs web resmi kurikulum merdeka (Kemendikbud, 2023). Tujuan dari semua upaya ini adalah memastikan pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan, termasuk guru, siswa, dan orang tua, dapat lebih baik memahami, mengakses, dan menerapkan Kurikulum Merdeka. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di zaman yang modern.

Implikasi Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar terhadap Pendidikan

Analisis implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dalam menangani kehilangan pembelajaran pasca pandemi COVID-19 masih menghadapi tantangan baru di kalangan penyelenggara pendidikan. Walaupun sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dan dukungan pemerintah sudah cukup baik, masih terdapat beberapa hambatan dalam menghadapi situasi riil di masyarakat, di mana kemampuan pemanfaatan teknologi belum sepenuhnya terampil dan terbatasnya alokasi anggaran

menjadi kendala. Tetapi, Kebijakan Merdeka Belajar tetap menjadi solusi terdepan dalam menghadapi tantangan pendidikan selama pandemi. Kebijakan ini memberikan peluang bagi siswa dan guru untuk belajar secara mandiri, mengeksplorasi beragam sumber pembelajaran tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, dan merangsang pengembangan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

Profesor Unifah Rosyidi dari UNJ menjelaskan pentingnya memahami beberapa aspek kunci untuk menerapkan program Merdeka Belajar. Ini termasuk transformasi kurikulum dan pembelajaran yang telah disetujui, perubahan dalam manajemen pendidikan nasional, serta perubahan manajemen pendidikan pada tingkat lokal dan otonomi sekolah. Dia juga menyoroti perlunya konsistensi kebijakan dan manajemen pendidikan antar kementerian, pemerintah pusat, dan daerah, yang dapat diperkuat dengan melibatkan National Education Council (NEC) dalam merumuskan kebijakan pendidikan presiden (Dharma, E. & Sihombing, 2020).

Hasil dari riset yang dilakukan oleh Sugiman dan koleganya menunjukkan bahwa program kebijakan Merdeka Belajar, terutama upaya penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang lebih simpel, praktis, dan terpusat pada 4C (*Communication, Collaboration, Critical Thinking, dan Creativity*), memberikan manfaat besar bagi para guru. Ini memungkinkan guru untuk lebih leluasa mengembangkan gagasan-gagasan pembelajaran mereka dan menjelajahi pengetahuan sesuai dengan bidang studi mereka. Dengan demikian, para guru dapat lebih fokus pada pengembangan proses pembelajaran, yang pada akhirnya membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran secara lebih mendalam, karena guru tidak lagi terikat oleh perangkat pembelajaran yang rumit (S. Sugiman, A. Suyitno, E. Pujiastuti, M. Masrukan, 2021).

Riset Aan Widiyono dan Izzah Millati menunjukkan dampak besar teknologi pendidikan dalam pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan, dan evaluasi Merdeka Belajar di era 4.0. Teknologi pendidikan bukan sekadar alat, melainkan sistem dan proses yang membantu mencapai tujuan spesifik, terutama dalam konteks "*Merdeka Belajar di era 4.0*". Fokus utamanya adalah pada literasi, numerasi, dan pembentukan karakter. Diharapkan, hal ini memungkinkan proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan bermakna bagi peserta didik (Widiyono & Millati., 2021).

Melalui penelitian ini, kita memahami bahwa kebijakan Merdeka Belajar memiliki dampak besar pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dan pengembangan metode pembelajaran yang superior. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Adnyani menunjukkan bahwa kebijakan ini memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan efisien di berbagai lokasi, asalkan terdapat fasilitas yang mendukung. Implementasi Media Pembelajaran sains "*Merdeka Belajar*" di TK Werdi Kumara Punggul menunjukkan kemajuan positif secara keseluruhan, menumbuhkan minat pada sains bagi anak usia dini. Saat bermain sains, guru memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk bergerak, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, serta membantu perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang penting dalam penyesuaian dengan lingkungan (Adnyani., 2021).

Berdasarkan informasi yang telah diungkapkan, kebijakan Merdeka Belajar memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peran guru. Sebagai agen kunci dalam dunia pendidikan, guru dapat menikmati peningkatan kebebasan dalam mengembangkan keterampilan mereka dalam proses pendidikan serta membantu membentuk generasi yang unggul sesuai dengan visi pemerintah untuk memajukan Indonesia menuju tahun 2045. Melalui Program Merdeka Belajar, peserta didik didorong untuk menjadi mandiri, sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang menekankan

kemampuan mereka dalam berpikir kritis, berperilaku baik, berinovasi, berkolaborasi, menghargai keragaman global, serta menjadi individu yang otonom. Ini mendorong peningkatan prestasi akademis mereka, tidak hanya dalam menguasai materi pelajaran, tetapi juga dalam kemampuan menganalisis dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Guru berperan sebagai pembimbing dan pelatih bagi peserta didik selama proses belajar dalam konteks ini (D. Sibagariang, H. Sihotang, 2021).

Selain itu, untuk memperkuat pemahaman dan penerapan konsep Merdeka Belajar, diperlukan pelatihan bagi guru, penyampaian pemahaman dan motivasi kepada siswa, serta kerjasama yang terstruktur dan terarah antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari kebijakan Merdeka Belajar (Daga, 2021).

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman kita terhadap analisis kebijakan kurikulum merdeka dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan penelitian pustaka, penelitian ini tidak hanya menggali teori dan analisis, tetapi juga menghadirkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan ini merubah paradigma pendidikan secara substansial. Dengan demikian, memahami kontribusi dan implikasi kebijakan kurikulum merdeka bukan hanya sekadar meningkatkan wawasan tentang pendidikan, tetapi juga membuka ruang bagi pemikiran inovatif dan strategis dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Penutup

Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar adalah suatu inisiatif penting dalam sistem pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk menghadapi perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Kurikulum Merdeka menekankan pada kebebasan belajar, memberikan fleksibilitas pada guru dan siswa dalam mengatur pembelajaran, dan memungkinkan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan adanya program ini, pendidikan diharapkan menjadi lebih inklusif, adaptif, dan relevan. Implementasi Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar juga memerlukan perubahan dalam manajemen pendidikan dan pengembangan teknologi pendidikan. Meskipun masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, kebijakan ini memberikan potensi peningkatan mutu pendidikan dan perubahan positif dalam proses pembelajaran di Indonesia.

Saran kedepannya penting bagi semua pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan, terutama guru, untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Hal ini melibatkan pemahaman tentang filosofi Merdeka Belajar, prinsip-prinsipnya, dan implikasinya pada pendidikan.

Daftar Pustaka

- Adnyani., N. W. (2021). Penerapan Media Pembelajaran Sains Pada Anak Usia Dini” Merdeka Belajar” Di Era Belajar Di Rumah. *Pratama Widya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 52(9).
- Azmar, S. (2001). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Cholilah, M., Tatuwo, A. G. P., Komariah, & Rosdiana, S. P. (2023). Pengembangan Kurikulum Merdeka Dalam Satuan Pendidikan Serta Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Abad 21. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(02), 56–67. <https://doi.org/10.58812/spp.v1i02.110>
- D. Sibagariang, H. Sihotang, dan E. M. (2021). Peran Guru Penggerak Dalam Pendidikan Merdeka Belajar Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 2, 11–18.

- Daga, A. T. (2021). Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(3), 1075–1090. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i3.1279>
- Dharma, E. & Sihombing, B. (2020). Merdeka Belajar: Kajian Literatur. *UrbanGreen Conference Proceeding Library*.
- Hamalik, O. (2012). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Jojo, A., & Sihotang, H. (2022). Analisis Kurikulum Merdeka dalam Mengatasi Learning Loss di Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Studi Kasus Kebijakan Pendidikan). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5150–5161. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3106>
- Kepmendikbud Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus, www.kemdikbud.go.id 9 (2020). <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/08/kemendikbud-terbitkan-kurikulum-darurat-pada-satuan-pendidikan-dalam-kondisi-khusus>
- Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, 3 Salinan Permendikbud 22 Tahun 2020 1 (2020). <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/SALINAN PERMENDIKBUD 22 TAHUN 2020.pdf>
- Kemdikbud. (2020a). *Kemendikbud Terbitkan Kurikulum Darurat pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus*. <https://www.kemdikbud.go.id/>. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/08/kemendikbud-terbitkan-kurikulum-darurat-pada-satuan-pendidikan-dalam-kondisi-khusus>
- Kemdikbud. (2020b). *Kurikulum Darurat Merupakan Penyederhanaan Kompetensi Dasar yang Mengacu pada Kurikulum 2013*. [Gtk.kemdikbud.go.id](http://gtk.kemdikbud.go.id). <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/kurikulum-darurat-merupakan-penyederhanaan-kompetensi-dasar-yang-mengacu-pada-kurikulum-2013>
- Kemdikbud. (2022). *Latar Belakang Kurikulum Merdeka*. [Pusatinformasi.Guru.Kemdikbud.Go.Id](http://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id). <https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/6824331505561-Latar-Belakang-Kurikulum-Merdeka>
- Kemdikbud. (2023). *Dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka*. [Kurikulum.Kemdikbud.Go.Id](http://kurikulum.kemdikbud.go.id). <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/kurikulum-merdeka/dukungan>
- Kemendikbudristek. (2022). Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka. *Kemendikbudristek*, 1–37.
- Khoirurrijal, Fadriati, Sofia, Anisa Dwi Makrufi, Sunaryo Gandi, Abdul Muin, Tajeri, Ali Fakhruddin, Hamdani, S. (2022). *Pengembangan Kurikulum merdeka*.
- Mendikbud. (2020). *SE Mendikbud: Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19*. <https://www.kemdikbud.go.id/>. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/se-mendikbud-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-covid19>
- SE Mendikbud No. 4 Tahun 2020: Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, (2020).
- Mestika, Z. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Bogor Indonesia.
- Mudlofir, A. (2012). *Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan Bahan Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam*. PT. Raja Grafindo Persad.

- S. Sugiman, A. Suyitno, E. Pujiastuti, M. Masrukan, dan I. H. (2021). Penguatan Pembelajaran dan Penilaian yang Bermuatan 4C Competence in Mathematics di Era “Merdeka Belajar” pada Guru-guru SMPN 24 Semarang. *Prosiding Seminar Nasional Matematika*, 487–492.
- Suhartono, O. (2021). Kebijakan Merdeka Belajar dalam Pelaksanaan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 8–19. <https://doi.org/10.18860/rosikhun.v1i1.13897>
- Widiyono, A., & Millati., I. (2021). Peran Teknologi Pendidikan dalam Perspektif Merdeka Belajar di Era 4.0. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 2(1), 1–9.